
ANALISIS DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI PROVINSI BANTEN

Wieta Chairunesia
chairunesiawieta@yahoo.com

Universitas Mercu Buana

ABSTRACT

This study was conducted to see the effect of Personal Tax Payers, the BI Rate, Inflation and the GDP of the Income Tax Receipts private in Banten province. This study used multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the amount of the individual taxpayer affected positively and negatively affect the GDP of the Personal Income Tax Revenue. Meanwhile, two other variables in this study, the BI Rate and Inflation does not affect the Personal Income Tax Revenue. This study uses a quantitative approach and using secondary data obtained from the Regional Office of Directorate General of Tax Banten, Bank Indonesia, and the body of the Central Statistics Banten Province. Data used in the form of quarterly data, starting from the first quarter of 2007 until the third quarter of 2014.

Keywords: Individual Taxpayers, BI Rate, Inflation, Personal Income Tax Revenue

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan umum dari semua kegiatan pemerintah diantaranya adalah pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Alokasi pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Dengan demikian, pajak berfungsi untuk mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga pemerataan kesejahteraan penduduk dapat tercapai.

Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang sedang mengalami perkembangan. Hal ini terlihat dari berkembangnya sector industri yang terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya sektor industri, akan menyerap

banyak tenaga kerja yang otomatis berdampak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang sedang mengalami perkembangan. Hal ini terlihat dari berkembangnya sektor industri yang terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya sektor industri, akan menyerap banyak tenaga kerja yang otomatis berdampak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Peningkatan sektor industri di Provinsi Banten juga tidak terlepas dari pendapatan per kapita karena merupakan nilai turunan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Banten. Pendapatan per Kapita adalah hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dalam kenyataannya penghitungan pendapatan yang benar – benar diterima oleh penduduk Banten sulit dilakukan karena masih belum tersedianya data arus pendapatan yang mengalir antar provinsi. Oleh karena itu sampai saat ini penyajian data pendapatan oleh Badan Pusat Statistik Banten masih menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang ada dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Pergerakan tingkat inflasi juga perlu untuk diperhatikan karena efeknya akan berdampak pada seluruh sector usaha. Menurut Al Safassy (2010) tingginya tingkat inflasi dapat menambah nilai kerugian yang berakibat pada meningkatnya tingkat pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan dalam upaya mempertahankan usahanya agar tetap eksis. Dengan begitu tingkat inflasi juga dapat mengindikasikan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Jika tingkat inflasi tinggi dan mengakibatkan angka pengangguran juga ikut meningkat, maka dapat menyebabkan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi mengalami penurunan.

Pada sisi lain, terdapat variabel yang juga berkaitan dengan variabel – variabel yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu suku bunga Bank Indonesia (*BI Rate*). Dalam menghadapi inflasi, Bank Indonesia memiliki kebijakan moneter untuk menekan laju inflasi yang terjadi. Sasaran operasional kebijakan moneter

dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan (www.bi.go.id). Dari uraian tersebut dapat diketahui jika BI menaikkan tingkat suku bunga maka laju inflasi dapat dikendalikan, maka secara tidak langsung hal tersebut juga dapat berdampak pada penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka cukup menarik untuk mengkaji lebih lanjut PDRB Provinsi Banten, Inflasi, *BI Rate* untuk memprediksi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Provinsi Banten.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Daya Pikul

Menurut Mardiasmo (2009) teori daya pikul pada hakekatnya mengandung suatu kesimpulan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Dan untuk kepentingan tersebut dibutuhkan adanya biaya yang harus dipikul oleh warga dalam bentuk pajak.

Pokok pangkal teori ini adalah tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang dan untuk mengukur daya pikul dapat dilihat dari 2 (dua) unsur yaitu unsur obyektif (penghasilan, kekayaan dan besarnya pengeluaran seseorang) dan unsure subyektif (segala kebutuhan terutama materiil dengan memperhatikan besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga).

Definisi dan Fungsi Pajak

Pajak memiliki bermacam-macam definisi, menurut Smeets dalam Ilyas dan Burton (2011) menjelaskan bahwa Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak memiliki beberapa fungsi, namun terdapat dua fungsi pajak menurut Waluyo & Wirawan (2009), diantaranya fungsi penerimaan (*Budgetair*) yaitu pajak sebagai sumber penerimaan kas negara untuk membiayai kegiatan pemerintah baik yang bersifat rutin maupun untuk membiayai pembangunan negara demi kesejahteraan bangsa, dan fungsi pengaturan atau regulasi (*Regulerend*) yaitu pajak berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mengatur permasalahan negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Jadi, dengan kata lain, pajak merupakan usaha pemerintah untuk dapat turut campur tangan dalam mengatur dan bilamana perlu, mengubah susunan anggaran pendapatan dan kekayaan negara.

Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Subekti dan Asrori dalam DW Fitriani (2012), pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991, Undang-Undang No. 10 Tahun 1994, Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Subjek Pajak Dalam Negeri (Orang pribadi, Badan, Warisan) dan Subjek Pajak Luar Negeri.

Definisi Suku Bunga

Menurut Samuelson dalam Gresta(2004:190) dalam Karlina (2009) menjelaskan bahwa suku bunga adalah jumlah bunga yang harus dibayarkan per unit waktu yang disebut sebagai persentase dari jumlah yang dipinjamkan.

Ada beberapa teori mengenai tingkat suku bunga ini. Teori-teori ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Teori Klasik

Menurut teori klasik tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga. Dimana semakin tinggi tingkat bunga, makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat bunga di mana makin tinggi tingkat bunga maka keinginan berinvestasi makin kecil.

2) Teori Keynes

Dalam teori Keynes, tingkat suku bunga merupakan suatu fenomena moneter. Maksudnya tingkat bunga ditentukan oleh pasar uang yaitu permintaan dan penawaran uang (*demand and supply of money*).

Peran Tingkat Suku Bunga dalam Kebijakan Moneter

Menurut Noviyanti (2013), kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan Bank Sentral atau Otoritas Moneter yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi).

Salah satu kebijakan moneter yang dilakukan Bank Sentral adalah politik diskonto, yaitu suatu kebijakan untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Jika

Bank Sentral menaikkan suku bunga diharapkan masyarakat tertarik untuk menyimpan uang di bank dan dengan demikian jumlah uang yang beredar berkurang. Selain itu kenaikan suku bunga tabungan akan meningkatkan suku bunga kredit, dengan naiknya suku bunga kredit maka minat untuk mengajukan kredit akan berkurang. Jika suku bunga turun, tentu keadaannya mencerminkan keadaan bahwa di masyarakat jumlah uang harus ditambah. Dengan bunga yang rendah masyarakat tidak tertarik untuk menabung dan suku bunga kredit akan turun dan mengakibatkan masyarakat banyak tertarik untuk mengajukan pinjaman ke bank. Dengan demikian jumlah uang yang beredar di masyarakat bertambah. Penurunan suku bunga biasanya dilakukan pada saat perekonomian mengalami kelesuan (resesi). Di Indonesia, kebijakan moneter terhadap penyesuaian tingkat suku bunga tersebut dilakukan melalui penetapan BI Rate. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter,2013).

Fungsi BI Rate

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Definisi Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian dimana terjadi kenaikan harga-harga secara terus menerus dan kenaikan harga yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa (Pohan, 2008), yang menyebabkan jumlah uang yang beredar lebih banyak. Banyaknya jumlah uang yang beredar disebabkan oleh adanya kenaikan dalam harga barang dan jasa yang biasa terjadi jika permintaan bertambah dibandingkan dengan jumlah penawaran atau persediaan barang di pasar.

Dampak Inflasi

- 1) Ketika biaya produksi meningkat akibat tingginya tingkat inflasi, menyebabkan pengusaha mengalami kerugian dan hal ini dapat menyebabkan kegiatan investasi beralih pada kegiatan yang kurang mendorong produksi nasional, seperti tindakan spekulatif yang mencari keuntungan sesaat.
- 2) Pada saat kondisi tidak menentu (inflasi) para pemilik modal cenderung menanamkan modalnya dalam bentuk pembelian property. Pengalihan investasi ini menyebabkan investasi produktif berkurang dan kegiatan ekonomi menurun.
- 3) Inflasi menimbulkan efek yang buruk bagi perdagangan dan mematikan potensi pengusaha dalam negeri. Hal ini dikarenakan kenaikan harga yang menyebabkan produk-produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk asing sehingga menurunnya kegiatan ekspor dan meningkatnya kegiatan impor.
- 4) Inflasi menimbulkan dampak yang buruk dalam neraca pembayaran. Karena menurunnya kegiatan ekspor dan meningkatnya kegiatan impor menyebabkan ketidakseimbangan terhadap aliran dana yang masuk dan keluar negeri sehingga memperburuk posisi neraca pembayaran.

Pendapatan per Kapita

Secara garis besar kegiatan ekonomi dikelompokkan ke dalam kegiatan memproduksi dan mengonsumsi barang dan jasa. Unit-unit produksi menghasilkan barang dan jasa, dan dari kegiatan memproduksi tersebut timbul pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor yang telah dimiliki oleh berbagai golongan dalam masyarakat, sehingga dari pendapatan ini masyarakat dapat membeli barang dan jasa baik untuk keperluan konsumsi maupun investasi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang ada dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Menurut BPS Provinsi Banten (2010) dari PDRB dapat diturunkan ukuran-ukuran penting lainnya yaitu Pendapatan per Kapita. Pendapatan per

Kapita adalah ukuran-ukuran indikator ekonomi PDRB dibagi dengan jumlah penduduk suatu region/wilayah.

Bila pendapatan per kapita meningkat maka akibat yang timbul adalah:

1. Semakin banyak penduduk yang terkena pajak karena memiliki pendapatan di atas batas minimum bebas pajak.
2. Semakin tinggi tarif yang dikenakan terhadap pendapatan per kapita akan mengakibatkan semakin tinggi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang diterima.

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Sejarah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten terbentuk karena adanya restrukturisasi organisasi instansi vertical Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2006. Restrukturisasi baru dilaksanakan pada tahun 2007 setelah terbit Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-1/PJ/2007.

Restrukturisasi yang dilakukan menyebabkan adanya perubahan nomenklatur dan/atau relokasi wilayah kerja Kantor Wilayah, salah satu Kantor Wilayah yang terdampak adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa bagian Barat I yang semula mempunyai wilayah kerja Provinsi Banten dan sebagian Provinsi Jawa Barat menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten dengan wilayah kerja Provinsi Banten dan bertempat kedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 34 Serang – Banten.

Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten menyelenggarakan fungsi :

1. Pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak;
2. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;
3. Bimbingan konsultasi dan penggalan potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer;
4. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan;
5. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian;
6. Bimbingan pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan;
7. Bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
8. Bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan;
9. Bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
10. Bimbingan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
11. Pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten.

1. Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tatausaha, rumahtangga, dan bantuan hukum.
2. Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi
Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, bimbingan konsultasi, bimbingan

penggalian potensi perpajakan, pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, serta penyajian informasi perpajakan.

3. Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian

Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan urusan kerjasama perpajakan, melaksanakan bimbingan ekstensifikasi, pendataan, dan penilaian, serta bimbingan dan pemantauan penerapan.

4. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak;

Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak (*peer review*), bantuan pelaksanaan penagihan, serta pelaksanaan urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

5. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan penyuluhan dan pelayanan perpajakan, melaksanakan urusan hubungan pelayanan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

6. Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding;

Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, pembetulan Ketetapan Pajak, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pengurangan sanksi administrasi, proses banding, proses gugatan, dan Peninjauan Kembali.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten memiliki wilayah kerja yang terdiri atas beberapa Kantor Pelayanan Pajak yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Banten, meliputi :

1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa
6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong
8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur
9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat

Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten

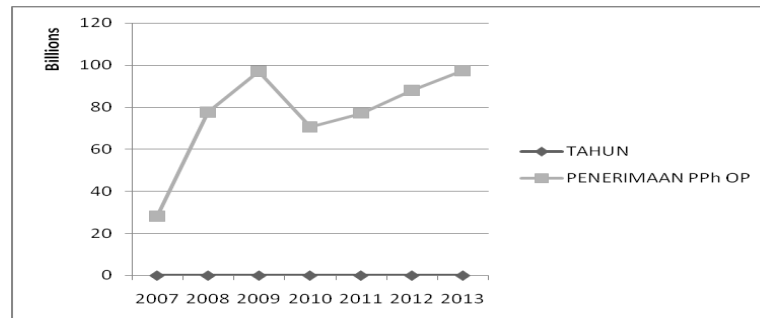
**Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Provinsi Banten
Tahun 2007-2013**

TAHUN	PENERIMAAN PPh		JUMLAH WAJIB PAJAK	
	OP	%	OP	%
2007	28.183.766.930		2.254.264	
2008	77.764.519.188	175,92%	3.643.908	61,65%
2009	96.954.862.348	24,68%	9.230.811	153,32%
2010	70.570.415.606	-27,21%	11.823.645	28,09%
2011	77.100.644.470	9,25%	13.995.879	18,37%
2012	87.924.405.333	14,04%	15.963.808	14,06%
2013	97.436.286.707	10,82%	17.811.800	11,58%

Sumber : Kanwil DJP Banten

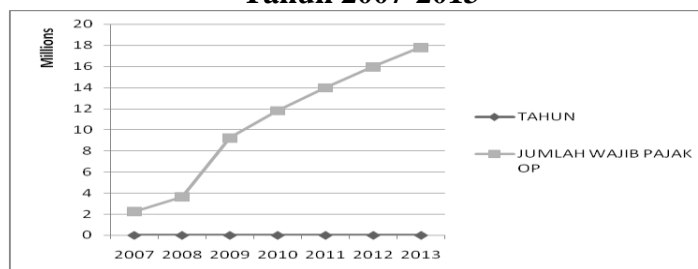
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Provinsi Banten mengalami kenaikan yang cukup sigifikan di tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yaitu kebijakan *Sunset Policy* pada tahun 2008 yang mendorong masyarakat yang belum melaporkan Pajak Penghasilan tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya dengan batas waktu 31 Maret 2009 untuk melaporkan Pajak Penghasilan mereka. Bagi Wajib Pajak yang melaporkan Pajak Penghasilannya pada periode tersebut akan mendapatkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Fluktuasi dari penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Provinsi Banten Tahun 2007-2013



Disamping meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Provinsi Banten, kebijakan *Sunset Policy* juga memberikan dampak pada jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Banten. Kebijakan *Sunset Policy* juga memberikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi masyarakat yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan melaporkan Pajak Penghasilan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Provinsi Banten Tahun 2007-2013



DESAIN DAN METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Dalam menjawab masalah yang ada, perlu dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya. Penulis memilih jenis penelitian kausal. Dalam penelitian kausal, hipotesis diuji tentang pengaruh satu atau beberapa variabel (variabel independen) terhadap variabel lainnya (variabel dependen).

Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Berdasarkan hipotesis yang telah dijelaskan, maka definisi dan operasionalisasi dari masing – masing variabel adalah sebagai berikut:

Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Pengertian	Skala	Pengukuran
1	Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Jumlah penerimaan atas pembayaran PPh Orang Pribadi yang telah dilaporkan kepada Kantor Wilayah Direktorat	Rasio	Total Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi per tiga bulan (triwulan) tahun 2007-2014 yang dinyatakan dalam Rupiah
2	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat	Rasio	Total Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi per tiga bulan (triwulan) tahun 2007-2014 yang
3	Suku Bunga Bank Indonesia	Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau <i>stance</i> kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan	Rasio	Total Suku Bunga Bank Indonesia per tiga bulan (triwulan) tahun 2007-2014 yang dinyatakan dalam Persentase
4	Inflasi	Suatu keadaan dalam perekonomian dimana terjadi kenaikan harga-harga secara umum, yang menyebabkan jumlah uang yang beredar lebih banyak. Banyaknya jumlah uang yang beredar disebabkan oleh adanya kenaikan dalam harga barang dan jasa yang biasa terjadi jika permintaan bertambah dibandingkan dengan jumlah penawaran atau persediaan barang di pasar	Rasio	Total Tingkat Inflasi Provinsi Banten per tiga bulan (triwulan) tahun 2007-2014 yang dinyatakan dalam Persentase
5	Pendapatan per Kapita	Merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sampai saat ini penyajian data pendapatan oleh Badan Pusat Statistik Banten masih menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Rasio	Total PDRB per tiga bulan (triwulan) tahun 2007-2014 yang dinyatakan dalam Rupiah

Pengukuran Variabel

Berikut ini adalah pengukuran atas setiap variabel dalam penelitian ini :

1. Penerimaan PPh Orang Pribadi (Variabel Dependen)

Skala pengukuran untuk Penerimaan PPh Orang Pribadi adalah skala rasio yaitu jumlah Penerimaan PPh Orang Pribadi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten per tiga bulan (triwulan) mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 yang dinyatakan dalam milyaran rupiah.

2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Variabel Independen)

Skala pengukuran untuk jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi adalah skala rasio yaitu jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten per tiga bulan (triwulan) sejak tahun pajak 2007 sampai dengan 2014 yang dinyatakan dalam jumlah orang.

3. Suku Bunga Bank Indonesia (Variabel Independen)

Skala pengukuran untuk suku bunga adalah skala rasio yaitu tingkat Suku Bunga BI per tiga bulan (triwulan) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 yang dinyatakan dalam persentase.

4. Inflasi (Variabel Independen)

Skala pengukuran untuk inflasi adalah skala rasio. Tingkat inflasi yang dipakai adalah Inflasi tahun kalender per tiga bulan (triwulan) dan dinyatakan dalam persentase.

5. Pendapatan per Kapita (Variabel Independen)

Skala pengukuran untuk pendapatan per kapita adalah skala rasio. Pendapatan per kapita yang dipakai adalah jumlah Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga konstan 2000 yang dinyatakan dalam rupiah.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah seluruh subyek atau sesuatu yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian populasi dan tidak melakukan sampling. Populasi dari penelitian ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Banten. Data populasi untuk variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang didapat dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten hanya sebanyak 28 data (mulai tahun 2007-2013). Agar data yang diuji memenuhi kriteria mendekati berdistribusi normal, peneliti berinisiatif melakukan penambahan data yaitu data pada tahun 2014 dengan melakukan *resampling* pada tahun tersebut dengan metode *bootstrapping*. Metode *resampling bootstrap* adalah membangun data bayangan (pseudo data) dengan menggunakan informasi dari data asli dengan tetap memperhatikan sifat-sifat dari data asli tersebut, sehingga data bayangan akan memiliki karakteristik yang semirip mungkin dengan data asli. Metode *resampling bootstrap* dikembangkan oleh Geisser dan Stone seperti yang dijelaskan Ghazali (2011) dalam Marini (2012).

Metode Analisis

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penulis melakukan analisis sebagai berikut:

1. Statistik deskriptif

Statistik Deskriptif memberikan gambaran baru atau deskripsi secara keseluruhan data perusahaan yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi.

2. Uji Normalitas Data

Pengujian apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian *Kolmogorov-Sminov Goodness of Fit Test* terhadap masing-masing variabel.

Kriteria pengujian:

Angka signifikansi (SIG) > 0.05, maka data berdistribusi normal

Angka signifikansi (SIG) < 0.05, maka data tidak berdistribusi normal

3. Uji Heterokedastisitas

Asumsi Heteroskedastisitas adalah asumsi dimana varians residual titik sama untuk satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang bias digunakan diantaranya yaitu Uji

Park, Uji Glesjer, Melihat Pola Grafik Regresi, dan Uji Koefisien Korelasi Spearman. Pada penelitian ini penulis akan melakukan Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Park, yaitu meregresikan nilai residual ($Lnei_2$) dengan masing-masing variabel dependen (LnX_1 , LnX_2 , LnX_3 , dan LnX_4).

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) H_0 : tidak ada gejala heteroskedastisitas
- 2) H_a : ada gejala heteroskedastisitas
- 3) H_0 diterima bila t hitung $<$ t tabel berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dan H_0 ditolak bila t hitung $>$ t tabel yang berarti terdapat heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan Uji Durbin Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- 2) Jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari Tabel Statistik Durbin Watson yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variable yang menjelaskan.

5. Uji Multikolinearitas

Pendeteksian terhadap multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance-Inflating Factor* (VIF) dari hasil analisis regresi. Jika nilai $VIF > 10$ maka terdapat gejala multikolinearitas yang tinggi.

Koefisien determinasi (R^2) menjelaskan proporsi variasi dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (lebih dari satu variabel: X_i ; $i = 1, 2, 3, 4, \dots, k$) secara bersama-sama.

Persamaan regresi linear berganda semakin baik apabila nilai koefisien determinasi (R^2) semakin besar (mendekati 1). Nilai yang digunakan untuk melakukan uji serempak adalah nilai F_{hitung} . Uji F yang signifikan menunjukkan bahwa variasi variabel terikat dijelaskan sekian persen oleh variabel bebas. Uji signifikansi secara parsial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

Nilai yang digunakan untuk melakukan pengujian adalah nilai t hitung dengan kriteria sebagai berikut:

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$; maka H_0 diterima

$t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$; maka H_0 ditolak atau

nilai $Pr \geq \alpha = 1\%$; maka H_0 diterima

nilai $Pr < \alpha = 1\%$; maka H_0 ditolak

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisa

Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable independent secara parsial didalam menerangkan variasi variable dependen (Ghozali, 2005). Berikut hasil spss dari uji T:

Uji T Tahun 2007-2014

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	33.480	4.363		7.674	.000
	Jumlah WP OP	3.418E-6	.000	2.354	2.629	.014
	BI Rate	-.050	.064	-.323	-.774	.446
	Inflasi	-.070	.180	-.184	-.388	.701
	PDRB	-5.283E-7	.000	-2.163	-2.552	.017

a. Dependent Variable: Penerimaan PPH OP

Dari Tabel 5.10 dapat dilihat t hitung sebesar 2.629 untuk Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, -0.774 untuk *BI Rate*, -0.388 untuk Inflasi dan -2.552 untuk PDRB. Lalu didapat pula t tabel dengan derajat kebebasan (df) 2.048 (uji 2 sisi). Dan dapat disimpulkan:

- 1) Untuk variabel Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu $T \text{ Hitung} > T \text{ Tabel}$ ($2.629 > 2.048$) artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Provinsi Banten.
- 2) Untuk variabel *BI Rate* yaitu $-T \text{ Hitung} > -T \text{ Tabel}$ ($-0.774 > -2.048$) artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara *Bi Rate* dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial *Bi Rate* tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- 3) Untuk variabel Inflasi yaitu $-T \text{ Hitung} > -T \text{ Tabel}$ ($-0.338 > -2.048$) artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara Inflasi dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- 4) Untuk variabel PDRB yaitu $-T \text{ Hitung} < -T \text{ Tabel}$ ($-2.552 < -2.048$) artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara PDRB dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial PDRB berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Pembahasan

1. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa $T \text{ Hitung} > T \text{ Tabel}$ ($2.629 > 2.048$) pada uji parsial tahun 2007 sampai dengan 2014 positif yang artinya secara parsial Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Provinsi

Banten. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Provinsi Banten. Adanya hubungan positif antara jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah, yaitu ketika Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami peningkatan, maka Penerimaan PPh Orang Pribadi mengalami peningkatan pula. Hal tersebut dapat terlihat dari koefisien regresi variabel Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,000003418 menunjukkan bahwa selama tahun 2007-2014 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi mengalami kenaikan sebesar 3,418 milyar Rupiah dengan adanya kenaikan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 1%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi akan menaikkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara signifikan di Provinsi Banten. Hasil yang sama juga ditunjukkan pada penelitian Nasution (2008) yang menyimpulkan bahwa secara parsial Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Provinsi Sumatera Utara.

2. Pengaruh *BI Rate* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa $-T \text{ Hitung} > -T \text{ Tabel}$ ($-0.774 > -2.048$) pada uji parsial tahun 2007 sampai dengan 2014 yang artinya secara parsial *BI Rate* tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Provinsi Banten. Dari hasil analisa tersebut juga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan negatif antara *BI Rate* dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan pergerakan *BI Rate* berjalan tidak searah dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, yaitu ketika *BI Rate* mengalami kenaikan mengakibatkan penurunan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan sebaliknya. Hal tersebut dapat terlihat dari koefisien regresi variabel *BI Rate* sebesar -0,050 menunjukkan bahwa selama tahun 2007-2014 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi mengalami penurunan

sebesar 0,050 milyar Rupiah dengan adanya kenaikan *BI Rate* sebesar 1%. Hasil yang sama ditunjukkan pada penelitian Megayanti (2010) yang menyimpulkan bahwa Suku Bunga BI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Sedangkan pada penelitian Noviyanti (2013) yang menyimpulkan terdapat hubungan jangka panjang yang stabil antara kebijakan pemerintah (*BI Rate*) dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

3. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa $T_{Hitung} < T_{Tabel}$ pada uji parsial tahun 2007 sampai dengan 2014 yang artinya secara parsial Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Provinsi Banten. Sama halnya dengan *BI Rate*, Inflasi juga berjalan tidak searah dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, yaitu ketika Inflasi mengalami kenaikan mengakibatkan penurunan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan sebaliknya. Hal tersebut dapat terlihat dari koefisien regresi variabel Inflasi sebesar -0,070 menunjukkan bahwa selama tahun 2007-2014 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi mengalami penurunan sebesar 0,070 milyar Rupiah dengan adanya kenaikan Inflasi sebesar 1%. Hasil yang sama ditunjukkan pada penelitian Megayanti (2010) yang menyimpulkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

4. Pengaruh PDRB terhadap terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa $-T_{Hitung} < -T_{Tabel}$ pada uji parsial tahun 2007 sampai dengan 2014 yang artinya secara parsial PDRB berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Provinsi Banten. Adanya hubungan negatif antara jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi menunjukkan bahwa adanya hubungan yang tidak searah, yaitu ketika Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami peningkatan, maka Penerimaan PPh Orang Pribadi mengalami penurunan. Hal tersebut dapat terlihat dari koefisien regresi variabel Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar -0,0000005283 menunjukkan bahwa selama tahun 2007-2014

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi mengalami penurunan sebesar 5,283 milyar Rupiah dengan adanya kenaikan jumlah PDRB sebesar 1%. Hasil yang sama ditunjukkan pada penelitian Megayanti (2010) Produk Domestik Bruto memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal tersebut mendukung hasil penelitian Nasution (2008) bahwa Pendapatan per Kapita mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Provinsi Sumatera Utara.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil analisa statistik diperoleh kesimpulan atas hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi selama tahun 2007-2014 di Provinsi Banten. Hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya kebijakan *Sunset Policy* dari Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2008 yaitu penghapusan sanksi administrasi bagi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan yang belum melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebelum tahun 2008. Dengan adanya kebijakan *Sunset Policy* memberikan efek meningkatnya Jumlah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya untuk melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
2. *BI Rate* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi selama tahun 2007-2014 di Provinsi Banten. Penyebab tidak berpengaruhnya *BI Rate* dimungkinkan karena dampak resesi keuangan global pada tahun 2008, yang menyebabkan tingkat *BI Rate* ditahun tersebut meningkat.
3. Inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi selama tahun 2007-2014 di Provinsi Banten. Sama halnya dengan *BI Rate*, penyebab tidak berpengaruhnya inflasi dimungkinkan karena adanya resesi keuangan global pada tahun 2008 yang menyebabkan tingginya tingkat Inflasi.

-
4. PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi selama tahun 2007-2014 di Provinsi Banten. Hal tersebut dapat disebabkan oleh resesi keuangan global pada tahun 2008 yang menyebabkan tingginya tingkat inflasi dan menekan angka pendapatan masyarakat Provinsi Banten sehingga turut menyebabkan PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi selama tahun 2007-2014 di Provinsi Banten.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan ini dapat dikemukakan saran – saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah & Kanwil DJP Banten

Dalam menata dan meningkatkan Penerimaan PPh Orang Pribadi di Provinsi Banten untuk masa yang akan datang, hendaknya memperhatikan faktor ekonomi PDRB dan peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut di karenakan variabel Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki pengaruh yang dominan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, begitu pula dengan jumlah PDRB yang harus selalu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Banten mengingat kenaikan dan penurunan PDRB berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2. Kepada peneliti selanjutnya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki peran cukup besar terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi di Provinsi Banten, alangkah baiknya peneliti-peneliti selanjutnya meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi atau faktor-faktor selain Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat mempengaruhi Penerimaan PPh Orang Pribadi di Provinsi Banten.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Safassy, Randy. (2010). *Analisis Pengaruh Suku Bunga SBI, Fluktuasi Kurs Dollar AS dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullaah, Jakarta.

-
- Altig and Carlstrom. (2010). *Inflation and The Personal Tax Code: Assessing and Indexation*. Diakses pada 06 April 2014 dari World Wide Web : http://www.clevelandfed.org/research/research_publication.cfm?id=35
- Andi, A. F. S., Chandrarin, G. (2005). *Analisis Pengaruh Upah, Dana Pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak (PPh OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Kudus*. Diakses pada tanggal 20 April 2014 dari World Wide Web : http://eprints.ums.ac.id/803/1/Jurnal_Daya_Saing_2_3.pdf.
- Ardani, R. P., Setiawan, J., & Sari, R. P. (2009). *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Belanja Pembangunan/Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Selama Tiga Dekade Terakhir*. Makalah Ilmiah. Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Surabaya.
- Dewi, I.,P. (2007). *Analisis Variabel- Variabel Yang Mempengaruhi Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Batu)*. Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2008). *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif Dengan Partial Least Squares (PLS)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilyas dan Burton. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Immervol. (2005). *The Impact of Inflation on Income Tax and Social Insurance Contributions in Europe*. Microsimulation Unit, Department of Applied Economics, University of Cambridge Sidgwick Avenue, Cambridge CB3 9DE, UK.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Marini, Jesica. (2012). *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)*. Tesis. Universitas Komputer Indonesia
- Nasution, I., F. (2008). *Analisis Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di Propinsi Sumatera Utara*. Tesis. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Nugraha, Adityo. (2005). *Analisis Penerimaan Pajak di Kota Surabaya di Tinjau dari Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi (1989-2003)*. Skripsi . Universitas Airlangga, Semarang.
- Oktivani, Debby. (2007). *Pengaruh Kepatuhan Pajak dan Jumlah Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Madiun*. Skripsi. Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Priyono, A.P., Aryanto, Y. & Fitriandi, P. (2014). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Salemba Empat : Jakarta.
- Waluyo dan Ilyas. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia 1*. Jakarta : Salemba Empat.